



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124  
Telepon (0561) 585349, Posel: humastu.kalbar@bpk.go.id

---

Nomor : 18B/S-HP/XIX.PNK/5/2024 Pontianak, 2 Mei 2024  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Kepada Yth.  
Keuangan Pemerintah Kabupaten Bupati Sintang  
Sintang Tahun 2023 di  
Sintang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian antara laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

- a. Kesalahan penganggaran Belanja Daerah pada sebelas SKPD sebesar Rp7.729.065.005,00;
- b. Pengelolaan dan realisasi belanja tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan tambahan penghasilan tidak sesuai ketentuan; dan
- c. Realisasi pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 13 SKPD tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Bupati Sintang agar memerintahkan:

- a. TAPD untuk memperbaiki mekanisme evaluasi penyusunan anggaran belanja masing-masing SKPD untuk memastikan substansi kegiatan sesuai dengan jenis anggaran;
- b. Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja yang berkaitan dengan Tunjangan Guru yaitu TPG, TKG, dan Tamsil sebesar Rp181.337.022,00 ke Kas Daerah dan memproses kekurangan pembayaran TKG untuk guru atas nama Wa sebesar Rp9.818.112,00; dan


c. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp659.537.117,72 dengan menyetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu laporan nomor 18.A/LHP/XIX.PNK/4/2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, bertanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat  
Kepala Perwakilan,**

  
**Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA  
NIP 197006011991031002**

Tembusan:  
Inspektur Kabupaten Sintang



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124  
Telepon (0561) 585349, Posel: humastu.kalbar@bpk.go.id

---

Nomor : 18B/S-HP/XIX.PNK/5/2024 Pontianak, 2 Mei 2024  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023 Kepada Yth.  
**Bupati Sintang**  
**di**  
**Sintang**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian antara laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

- a. Kesalahan penganggaran Belanja Daerah pada sebelas SKPD sebesar Rp7.729.065.005,00;
- b. Pengelolaan dan realisasi belanja tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan tambahan penghasilan tidak sesuai ketentuan; dan
- c. Realisasi pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 13 SKPD tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Bupati Sintang agar memerintahkan:

- a. TAPD untuk memperbaiki mekanisme evaluasi penyusunan anggaran belanja masing-masing SKPD untuk memastikan substansi kegiatan sesuai dengan jenis anggaran;
- b. Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja yang berkaitan dengan Tunjangan Guru yaitu TPG, TKG, dan Tamsil sebesar Rp181.337.022,00 ke Kas Daerah dan memproses kekurangan pembayaran TKG untuk guru atas nama Wa sebesar Rp9.818.112,00; dan

c. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp659.537.117,72 dengan menyetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu laporan nomor 18.A/LHP/XIX.PNK/4/2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, bertanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat**  
**Kepala Perwakilan,**



**Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA**  
**NIP 197006011991031002** *α*

Tembusan:  
Inspektur Kabupaten Sintang



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**LAPORAN KEUANGAN POKOK**

**1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
<b>PENDAPATAN – LRA</b>	<b>4.1.1</b>	<b>2.013.820.167.603,00</b>	<b>2.036.118.435.271,19</b>	<b>101,11</b>	<b>1.780.017.927.520,58</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>179.403.714.301,00</b>	<b>172.973.442.067,93</b>	<b>96,42</b>	<b>162.366.717.402,46</b>
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	4.1.1.1.1	76.577.000.000,00	57.681.892.645,50	75,33	41.665.868.567,10
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	4.1.1.1.2	4.652.052.000,00	3.590.851.183,59	77,19	3.511.868.658,24
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	4.1.1.1.3	12.474.462.301,00	12.595.209.012,00	100,97	10.709.858.275,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	4.1.1.1.4	85.700.200.000,00	99.105.489.226,84	115,64	106.479.121.902,12
<b>PENDAPATAN TRANSFER – LRA</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>1.829.916.453.302,00</b>	<b>1.858.644.993.203,26</b>	<b>101,57</b>	<b>1.613.631.210.118,12</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA</b>	<b>4.1.1.2.1</b>	<b>1.356.376.973.106,00</b>	<b>1.382.926.838.146,06</b>	<b>101,96</b>	<b>1.178.604.716.170,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	4.1.1.2.1.1	29.109.035.985,00	44.928.876.504,00	154,35	46.478.342.269,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	4.1.1.2.1.2	90.108.173.366,00	108.070.734.913,00	119,93	16.115.553.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	4.1.1.2.1.3	891.501.307.000,00	891.428.076.000,00	99,99	836.375.896.418,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	4.1.1.2.1.4	345.658.456.755,00	338.499.150.729,06	97,93	279.634.924.483,00
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA</b>	<b>4.1.1.2.2</b>	<b>368.636.637.000,00</b>	<b>368.153.833.870,00</b>	<b>99,87</b>	<b>353.507.373.000,00</b>
Dana Penyesuaian – LRA	4.1.1.2.2.1	342.149.842.000,00	341.667.038.870,00	99,86	342.843.467.000,00
Dana Insentif Daerah – LRA	4.1.1.2.2.2	26.486.795.000,00	26.486.795.000,00	100,00	10.663.906.000,00
<b>Transfer Pemerintah Provinsi– LRA</b>	<b>4.1.1.2.3</b>	<b>104.902.843.196,00</b>	<b>107.564.321.187,20</b>	<b>102,54</b>	<b>81.519.120.948,12</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	4.1.1.2.3.1	88.512.843.196,00	91.440.795.587,20	103,31	79.535.557.148,12
Pendapatan Transfer Lainnya – LRA	4.1.1.2.3.2	16.390.000.000,00	16.123.525.600,00	98,37	1.983.563.800,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LRA</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.020.000.000,00</b>
Pendapatan Hibah – LRA	4.1.1.3.1	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.020.000.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA	4.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Ref	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
<b>BELANJA</b>	<b>4.1.2</b>	<b>1.690.144.603.960,00</b>	<b>1.478.056.888.968,71</b>	<b>87,45</b>	<b>1.328.977.136.222,31</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>1.374.524.123.002,00</b>	<b>1.178.950.289.290,20</b>	<b>85,77</b>	<b>1.137.829.897.279,31</b>
Belanja Pegawai	4.1.2.1.1	769.064.751.162,00	638.321.734.870,00	83,00	627.666.020.862,56
Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.1.2	544.194.639.156,00	484.836.213.436,20	89,09	472.573.551.860,75
Belanja Subsidi	4.1.2.1.3	800.015.581,00	800.015.581,00	100,00	753.471.164,00
Belanja Hibah	4.1.2.1.4	60.120.935.103,00	54.652.743.403,00	90,90	34.080.803.392,00
Belanja Bantuan Sosial	4.1.2.1.5	343.782.000,00	339.582.000,00	98,78	2.756.050.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	4.1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>307.221.770.188,00</b>	<b>292.311.838.674,51</b>	<b>95,15</b>	<b>189.346.459.659,00</b>
Belanja Tanah	4.1.2.2.1	4.766.500.000,00	1.011.154.000,00	21,21	760.147.200,00
Belanja Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.2	40.070.216.630,00	35.546.552.973,51	88,71	40.565.232.108,00
Belanja Gedung dan Bangunan	4.1.2.2.3	114.582.485.710,00	111.420.275.492,00	97,24	39.754.346.725,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.1.2.2.4	138.518.157.217,00	135.073.721.096,00	97,51	99.293.037.810,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2.5	9.284.410.631,00	9.260.135.113,00	99,74	8.973.695.816,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>4.1.2.3</b>	<b>8.398.710.770,00</b>	<b>6.794.761.004,00</b>	<b>80,90</b>	<b>1.800.779.284,00</b>
Belanja Tak Terduga	4.1.2.3.1	8.398.710.770,00	6.794.761.004,00	80,90	1.800.779.284,00
<b>TRANSFER</b>	<b>4.1.3</b>	<b>471.961.993.328,00</b>	<b>471.475.213.248,00</b>	<b>99,90</b>	<b>473.510.079.549,00</b>
<b>TRANSFER BAGI HASIL KE DESA</b>	<b>4.1.3.1</b>	<b>8.122.905.200,00</b>	<b>8.122.905.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.342.901.835,00</b>
Bagi Hasil Pajak Daerah	4.1.3.1.1	7.657.700.000,00	7.657.700.000,00	100,00	9.732.200.000,00
Bagi Hasil Retribusi	4.1.3.1.2	465.205.200,00	465.205.200,00	100,00	610.701.835,00
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>4.1.3.2</b>	<b>463.839.088.128,00</b>	<b>463.352.308.048,00</b>	<b>99,90</b>	<b>463.167.177.714,00</b>
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	4.1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	4.1.3.2.2	463.839.088.128,00	463.352.308.048,00	99,90	463.117.177.714,00
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>		<b>2.162.106.597.288,00</b>	<b>1.949.532.102.216,71</b>	<b>90,17</b>	<b>1.802.487.215.771,31</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>4.1.4</b>	<b>(148.286.429.685,00)</b>	<b>86.586.333.054,48</b>	<b>(58,39)</b>	<b>(22.469.288.250,73)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>4.1.5</b>	<b>148.286.429.685,00</b>	<b>148.286.429.685,40</b>	<b>100,00</b>	<b>181.255.717.936,13</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.1.5.1</b>	<b>158.786.429.685,00</b>	<b>158.786.429.685,40</b>	<b>100,00</b>	<b>190.755.717.936,13</b>
Penggunaan SiLPA	4.1.5.1.1	158.786.429.685,00	158.786.429.685,40	100,00	190.755.717.936,13
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.1.5.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Ref	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.1.5.2</b>	<b>10.500.000.000,00</b>	<b>10.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.500.000.000,00</b>
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.1.5.2.1	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100,00	9.500.000.000,00
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>4.1.6</b>	<b>0,00</b>	<b>234.872.762.739,88</b>		<b>158.786.429.685,40</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

  
**BUPATI SINTANG,**  
**JAROT WINARNO**